



Pemerintah Kota Batam

Rencana Kerja

# **RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dinas Koperasi dan  
Usaha Mikro  
Kota Batam

Alamat : Jl. Pramuka No. 1  
Sekupang Batam

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Rencana Kerja Perubahan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023, juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih belum sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Batam, 2023  
**Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Kota Batam**

**Hendri Arulan, S.Pd**  
**NIP. 196707191991031009**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-3
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN LALU</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Triwulan II (2023) dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam .....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam .....	II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam .....	II-11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-27
<b>BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam .....	III-3
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.....	III-5
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>IV-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022 .....	II-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam .....	II-8
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2023 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam.....	II-15
Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Batam.....	II-28
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 .....	III-2
Tabel 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	III-10
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023, Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Batam.....	III-18
Tabel 3.4 Rencana Perubahan dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023 .....	III-30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, setiap PD Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perubahan Tahunan. Rencana Kerja Perubahan PD disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

### **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja (Renja-PD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L embaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107) ;
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862).
12. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 942).
13. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2023 tentang RKPD Perubahan

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai

harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2023.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2022, antara lain :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
4. Review terhadap rancangan Awal RKPD;
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan;

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD serta

Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain :

1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional;
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3. Program dan Kegiatan.

#### **BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja Perubahan serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023.

#### **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TRIWULAN II**

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Triwulan II (2023) dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam**

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2022 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Anggaran 2022. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun anggaran 2022, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 14,364,380,737 .

**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN**  
**RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022**  
**KOTA BATAM**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (2021)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				2020	Target renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun n-2	Tingkat realisasi (%)	2022	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan n-1	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					2022	2022			2022	
1	2	3	4	5	6	7	(8)= (7) : (6)	9	(10)= (5) + (7)	(11) = {(10): (4)}*100%
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							

2	17	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100%	52,99%	52,99%	100%	52,99%	52,99%
2	17	1	02.02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang terpenuhi	100 %		100%	46,98%	46,98%	100%	46,98%	46,98%
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan		33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	100%	38 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	80,49%
2	17	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	17	1	02.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase penyediaan Administrai Umum Perangkat Daerah	100 %		100%	56,41%	56,41%	100%	56,41%	56,41%
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	17	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	25%
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33,33%
2	17	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

2	17	1	02.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %		100%	81,94%	81,94%	100%	81,94%	81,94%
2	17	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	0	1 Paket	100%
2	17	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit		48 Unit	48 Unit	100%	0	48 Unit	100%
2	17	1	02.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100%	53,01%	53,01%	100%	53,01%	53,01%
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Lapopran	100%
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	17	1	02.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %		100%	48,43%	48,43%	100%	48,43%	48,43%
2	17	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

2	17	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	75%
2	17	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit		20 Unit	20 Unit	100%	38 Unit	20 Unit	35,71%
2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
2	17	3			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Aktif	32.02 %		0	0	0%	26,94%	0%	0%
2	17	3	02.01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	9,26 %		0	0	0%	0,77%	0%	0%
2	17	3	02.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	120 Unit		0	0	0%	35 Unit	0%	0%
2	17	4			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang Sehat	91.67 %		0	0	0%	0	0%	0%
2	17	4	02.01		<b>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	62,50%		100%	0	0%	0	0%	0%
2	17	4	02.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit		100 Unit	0	0%	0	0%	0%

2	17	5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	30.79 %		18,59%	22,47%	121%	21,38%	22,47%	72,98%
2	17	5	02.01		<b>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Koperasi yang dilatih	53,06%		41,49%	27,94%	67,34%	52,40%	27,94%	52,66%
2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi (Pengurus) yang dilatih	172 Orang		100 orang	100 Orang	100%	131 orang	100 Orang	58,14%
2	17	5	02.03		<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	26,90%		10,53%	10,35%	98,30%	15%	10,35%	38,48%
2	17	5	02.03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih	500 orang		72 Orang	72 Orang	100%	105 Orang	72 Orang	14,40%
2	17	7			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif	39.21 %		27,03%	0	0%	30%	0%	0
2	17	7	02.01		<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Terlaksana nya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	729 Unit		300 Unit	0	0%	101 Unit	0%	0
2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150 Unit Usaha		0	0	0%	0	0%	0

2	17	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	550 Unit		150 Unit	150 Unit	100%	100 Unit	150 Unit	27,27%
2	17	7	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dibina dan bernilai tambah	28 Unit		0	0	0%	0	0%	0
2	17	8			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	53.79 %		26,32%	24,61%	93,50%	42,15%	24,61%	45,75%
2	17	8	02.01		<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	1.000 Unit		180 Unit	108 Unit	100%	360 Unit	108 Unit	10,80%
2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	750 Unit		150 Unit	37 Unit	25%	300 Unit	37 Unit	4,93%
2	17	8			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>									
2	17	8	02:01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>									
2	17	8	02:01	1	<b>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</b>									

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Th 2021 (th-2)	Th 2022 (th-1)	Th 2023 (th-2)	Th 2024 (th+1)	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase koperasi yang aktif	-	√	0,00%	26.94%	27.70%	28.81%	30.23%	32.02%	2,55%	3,73%	56%	80%	
2	Persentase koperasi yang sehat	-	√	0,00%	0,00%	80%	83.33%	88.89%	91.67%	40%	55%	100%	100%	
3	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	-	√	18.59%	21.38%	23.77%	25.36%	27.26%	30.79%	35%	60%	100%	100%	
4	Persentase peningkatan kinerja (nilai omzet) koperasi	-	√	0.00%	21%	0.00%	0.00%	24%	0.00%	20%	21%	100%	100%	
5	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	-	√	27.03%	30%	34.45%	35.34%	37.45%	39.21%	26.94%	43.34%	100%	100%	
6	Persentase usaha mikro ekonomi kreatif	-	√	26.32%	42.15%	43.76%	45.45%	48.60%	53.79%	23.24%	24.85%	100%	100%	

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Kurang Adanya pemahaman Pelayanan tentang Perkoperasian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima cukup tinggi.

2. Pemasaran

Permasalahan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas dan tergantung kualitas produk (a.l : Ketersediaan bahan baku, pengolahan, kemasan dan legalitas ), jaringan, akses pasar dan pemanfaatan teknologi.

3. Permodalan,

Kurangnya permodalan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya, perlu dukungan permodalan baik melalui pemerintah, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

4. Aksesibilitas

Adanya kesenjangan pembangunan sektor ekonomi di wilayah hinterland dengan mainland, di mana para pelaku ekonomi di mainland sangat mudah dalam mengakses sumber daya, fasilitas, kemudahan lainnya, sedangkan di sisi lain pelaku

ekonomi di hinterland sangat terbatas, diakibatkan antara lain kurangnya kemampuan sumber daya manusia, sulitnya aksesibilitas kepada sumber daya ekonomi.

#### 5. Teknologi

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan ahli teknologi masih kurang sehingga belum menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain: Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan good government, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur dan sistem kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro melalui PLUT KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan wirausaha baru;
- d. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro meningkat.
- e. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, usaha Mikro melalui BLUD serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga Non Bank.
- f. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

#### **❖ Permasalahan dan hambatan**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain;

- a. Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan fungsi dan tugas teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM.
- b. Belum adanya sistem pemasaran bersama produk Koperasi dan UKM Bantuan perkuatan permodalan

bagi Koperasi dan UMKM belum dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.

- c. Akses teknologi KUMKM masih menggunakan teknologi sederhana, dan kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi
- e. Keterbatasan Sarana Produksi, terbatasnya permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi, peluang pasar.
- f. Kualitas produk belum berdaya saing.
- g. Belum adanya sistem informasi dan database KUMKM yang akurat Rendahnya kewirausahaan dan Kompetensi Kapasitas SDM KUMKM.
- h. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran KUMKM.

#### ❖ **Peluang dan Tantangan**

Peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; Dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Batam tengah di hadapkan dengan berbagai macam tantangan antara lain;

- a. Masih kurangnya UMKM yang mendapat fasilitasi pembiayaan dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM;
- b. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;
- c. Adanya pergantian kepemimpinan Koperasi;
- d. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk UMKM dalam arena;
- e. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan nomenklatur OPD;
- f. Belum Validnya data UMKM;
- g. Adanya Perubahan Regulasi.

Namun dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Batam ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian;
- Adanya Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kota Batam;
- Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya;
- Tersedianya berbagai fasilitas keuangan sehingga KUMKM semakin mudah untuk mendapatkan permodalan;
- Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan pencari kerja;
- Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan media Informasi;
- Tumbuh kembangnya industri kreatif unggulan daerah yang berorientasi pada kearifan lokal sebagai daya tarik;
- Peraturan perundang-undangan tentang KUMKM (UU tentang KUMKM, Permen tentang KUMKM, PP tentang KUMKM, Perda tentang KUMKM) memberikan kesempatan luas untuk pengembangan usaha KUMKM;
- Alokasi pembiayaan dari Kementerian KUKM RI melalui LPDB dan KUR;
- Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM Meningkatkan arus investasi asing ke Kota Batam;

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Batam Tahun 2023, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2023. Dalam perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 menjadi Rencana Kerja Perubahan tahun 2023, dibutuhkan penyesuaian Rencana Kerja Perubahan melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut. Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja Perubahan tahun 2023. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Batam	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>100%</b>	<b>10.689.968.478</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	<b>100%</b>	<b>10.989.725.737</b>	
I	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	<b>100%</b>	8.919.595.988	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	<b>100%</b>	<b>8,828,478,937</b>	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah PNS DISKUM Kota Batam yang menerima gaji dan tunjangan	41 orang	8.840.577.988	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah PNS DISKUM Kota Batam yang menerima gaji dan tunjangan	41 orang	8,778,238,937	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	79.018.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	50,240,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>100%</b>	260.958.050	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>100%</b>	<b>292,425,000</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah target Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3.355.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	20,927,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	53.411.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	63,247,000	
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	38.183.500	Penyediaan bahan logistik kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	15,114,000	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	26.592.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	15,065,000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	139.415.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	178,072,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Batam	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	192.400.000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Batam	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>518,648,000</b>	
1	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 unit	0	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 unit	0	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	48 Unit	192.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	48 Unit	518,648,000	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Paket	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Paket	0	
IV	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Batam	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	699.448.640	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Batam	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>707,406,800</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	322.460.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	322,460,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum Umum Kantor yang	12 Laporan	376.988.640	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	384,946,800	
V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	617.565.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	642,767,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 Unit	38.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,280,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	4 Unit	140.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	140,400,000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Unit	43.020.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Unit	40,650,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor yang Pelihara/Rehabilitasi	2 unit	395.865.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	423,437,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Batam	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>32,02%</b>	<b>146.837.345</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Batam	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>32,02%</b>	<b>196,321,000</b>	
I	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Batam	<b>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</b>	<b>2,96%</b>	<b>146.837.345</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Batam	<b>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</b>	<b>2,96%</b>	<b>196,321,000</b>	
1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Unit Usaha	<b>146.837.345</b>	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Unit Usaha	196,321,000	
C	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Batam	<b>Persentase Koperasi yang Sehat</b>	<b>92%</b>	<b>125.266.176,00</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Batam	<b>Persentase Koperasi yang Sehat</b>	<b>91,67%</b>	<b>139,552,500</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	41,67%	125.266.176,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	41,67%	139,552,500	
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	50 Unit Usaha	125.266.176,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	50 Unit Usaha	139.552.500	
D	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Batam	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	30,79%	528.783.454	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Batam	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	30,79%	463,838,000	
I	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase koperasi yang dilatih	138 orang	277.624.309	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	138 orang	241,109,500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kabupaten/Kota					
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Batam	Jumlah SDM yang memenuhi pengetahuan perkoperasian	180 Orang	277.624.309	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Batam	Jumlah SDM yang memenuhi pengetahuan perkoperasian	180 Orang	241.109.500	
II	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	16,76%	251.159.145	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	16,76%	222,728,500	
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Batam	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	180 Orang	251.159.145	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	180 Unit Usaha	222.728.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Batam	<b>Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif</b>	<b>39%</b>	<b>1.061.042.741</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Batam	<b>Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif</b>	<b>39,21%</b>	<b>806,460,500</b>	
I	<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Batam	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	<b>39%</b>	1.061.042.741	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Batam	Terlaksananya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	<b>39,21%</b>	<b>806.460.500</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	160 Unit Usaha	393.010.200	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	160 Unit Usaha	252,538,000	
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250 Unit Usaha	366.724.721	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250 Unit Usaha	268,286,500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Batam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 Orang	301.307.820	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Batam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 Orang	285,636,000	
G	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Batam	<b>Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif</b>	<b>53.79 %</b>	<b>1,012,609,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Batam	<b>Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif</b>	<b>53.79 %</b>	<b>1,768,483,000</b>	
I	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Batam	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	<b>540 Unit Usaha</b>	<b>1,012,609,000</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Batam	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	<b>470 Unit Usaha</b>	<b>1,768,483,000</b>	
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Batam	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,	540 Unit Usaha	1,012,609,000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	Batam	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,	540 Unit Usaha	1,768,483,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			serta Desain dan Teknologi			Teknologi		serta Desain dan Teknologi			

## **2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan pembangunan daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem SIPD yang diajukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU**  
**KEPENTINGAN TAHUN 2023 KOTA BATAM**

**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam**

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umk)</b>		<b>Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif</b>		
<b>a</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Patam Lestari	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan Packaging di 100 Orang	Pokir
2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Teluk Tering	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan Enterpreneurship 50 Orang	Pokir
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Tanjung Buntung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan Enterpreneurship 50 Orang	Pokir
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Tembesi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan Enterpreneurship 100 Orang	Pokir

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS**  
**KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM**

**3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Batam, yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”. Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Mendorong Investasi;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Dinas Koperasi Kota Batam selaku pelaksanaan kebijakan publik, agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga. Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menyusun Rencana Kerja Perubahan dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih profesional.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam**  
**Tahun 2024**

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target 2024
1	2	3	4	5
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro			28,21%
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terhadap Layanan Kesekretariatan	100%
		Meningkatnya produktifitas Koperasi di Kota Batam	Pertumbuhan Omzet Koperasi	23,00%
		Meningkatnya produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	58,59%
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah			78,07%
		Meningkatkan Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Kota Batam	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	27,00%

Sasaran utama Pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan diteruskan dalam sasaran kinerja DISKUM Kota Batam tahun 2022 dengan cara meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Sementara itu sasaran utama pemerintah dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional didukung DISKUM Kota Batam melalui sasaran kinerja DISKUM Kota Batam tahun 2022 dengan sasaran kinerja pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan kepegawaian serta membangun SDM aparatur yang berkepribadian, kompeten dan kompetitif.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah :

**“Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan Perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif”**

Maka strategi yang diletakkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan

2. Peningkatan produktifitas usaha dan kelembagaan koperasi
3. Meningkatkan pengawasan koperasi sector rill dan usaha simpan pinjam
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan daya saing Koperasi
5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui pengembangan SDM, produksi, pengolahan, pemasaran, desain dan teknologi
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi public
7. Meningkatkan SDM Perangkat Daerah yang diberi pendidikan dan pelatihan lanjutan
8. Meningkatkan penggunaan system informasi dalam proses pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai. Sasaran yang diterapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 5 (lima) tahun kedepan. Dinas Koperasi Kota Batam menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktifitas koperasi dan usaha mikro di Kota Batam
2. Meningkatnya peran usaha mikro ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Batam
3. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

### **3.3. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam**

Rencana Kerja Perubahan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2022 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sub kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam selama 1 tahun. Pada sub kegiatan ini terdiri dari belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan PNS serta tambahan tunjangan penghasilan PNS. Dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkat semangat pengabdian

untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Sub Kegiatan ini merupakan penyediaan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (pembantu bendahara pengeluaran dan pengurus barang), pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos (materai) selama 1 tahun.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Sub kegiatan ini adalah merupakan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yaitu penyediaan baterai untuk keperluan kantor selama 1 tahun
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini terdiri dari belanja operasi (belanja barang dan jasa) serta belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin). Dengan terlaksananya kegiatan ini akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- c) Penyediaan bahan Logistik Kantor. Sub kegiatan ini terdiri dari belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor.
- d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 1 tahun.
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan. Sub kegiatan ini adalah

untuk kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun seperti koran/majalah dan buku.

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sub kegiatan ini merupakan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengiriman berkas atau dokumen untuk keperluan kantor.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor seperti tenaga honorarium kontrak.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini merupakan penyediaan untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk mobil kepala badan selama 1 (satu) tahun.

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan. Sub kegiatan ini merupakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kendaraan dinas sebanyak 4 unit selama 1 (satu) tahun.

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor selama 1 (satu) berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, acces door, dan lain-lain.

d) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

## II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
  - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

## III. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

## IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

## V. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

## VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan sub sub kegiatan:
  - a) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - b) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
  - c) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - d) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.

## VII. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan:
  - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

TABEL 3.2

## PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	12,184,898,311	0	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	-	9,711,326,831	7,936,001,859	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	41 orang/bulan	41 Orang/bulan	9,656,062,831	7,936,001,859	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
				Tunjangan ASN					
		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/verifikasi Keuangann SKPD	12 Dokumen	2 Paket	55,264,000	227,607,500	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peresentasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	4 Paket	321,667,500	3,650,000	
		Penyediaan komponen Instansi Listrik/Bangunan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	23,019,700	59,564,500	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Unit	69,571,700	113,575,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17 Unit	16,625,400	0	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	17 Unit	16,571,500	113,575,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	100%	195,879,200	582,447,008	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 Laporan	666,712,800	197,500,208	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	48 Unit	12 Laporan	570,512,800	384,946,800	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	778,147,480	184,480,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	100%	354,706.000	38,280,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Unit	423,441,480	105,550,000	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Memelihara Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	56 Unit	707,043,700	40,650,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	1 Unit	-	42,108,000	0	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	100%	154,440,000	90,943,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang-- Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	100%	154,440,000	90,943,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	60 Unit Usaha	44,715,000	90,943,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
			Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	465,780,700	0	
		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Aktif	32.02%	-	215,953,100	5,920,000	
		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Sehat		25%	215,953,100	5,920,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase yan dinilai Kesehatanya	2.96%	100%	215,953,100	0	
		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Unit Usaha	180 Koperasi	153,507,750	241,109,500	
		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat	91.67 %	168 Orang	153,507,750	241,109,500	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu)</b>	Persentase yan dinilai Kesehatanya	41.67 %	100%	<b>510,221,800</b>	165,660,500	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		
			<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>							
<b>TOTAL</b>									51.856.170.290	47.761.008.304

**Tabel 3.3**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2023,  
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KOTA BATAM**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	17				14,364,380,737			15,897,018,811					
2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100 %	10,989,725,737		100 %	12,184,898,311		
2	17	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100 %	8,828,478,937		100 %	9,711,326,831		
2	17	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	41 Orang/b ulan	8,778,238,937	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	41 Orang/bulan	9,656,062,831
2	17	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokume n	50,240,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Dokumen	55,264,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2	17	1	2.1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100 %	<b>292,425,000</b>			100 %	<b>321,667,500</b>
2	17	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	20,927,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Paket	23,019,700
2	17	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	63,247,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Paket	69,571,700
2	17	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	15,114,000	Pendapata n asli daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Paket	16,625,400
2	17	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	15,065,000		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Paket	16,571,500
2	17	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	178,072,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	195,879,200
2	17	1	2.1		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan	Kota Batam	100 %	<b>518,648,000</b>			100 %	<b>666,712,800</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
						pemerintah daerah yang terpenuhi							
2	17	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	48 Unit	518,648,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	48 Unit	570,512,800
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100 %	<b>707,406,800</b>			100 %	<b>778,147,480</b>
2	17	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	322,460,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	354,706,000
2	17	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	384,946,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	423,441,480
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100 %	<b>642,767,000</b>			100 %	<b>707,043,700</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2	17	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	38,280,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	42,108,000
2	17	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	4 Unit	140,400,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Unit	154,440,000
2	17	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	56 Unit	40,650,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	56 Unit	44,715,000
2	17	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	423,437,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Unit	465,780,700
2	17	3			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Aktif	Kota Batam	32.02 %	<b>196,321,000</b>			32.02 %	<b>215,953,100</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2	17	3	2		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	Kota Batam	2.96 %	196,321,000			2.96 %	215,953,100
2	17	3	2	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	120 Unit Usaha	196,321,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Koperasi Aktif	120 Unit Usaha	215,953,100
2	17	4			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang Sehat	Kota Batam	91.67 %	139,552,500			91.67 %	153,507,750
2	17	4	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yan dinilai kesehatannya	Kota Batam	41.67 %	139,552,500			41.67 %	153,507,750

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2	17	4	2	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Batam	50 Unit Usaha	139,552,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Koperasi yang telah melaksanakan RAT	50 Unit Usaha	153,507,750
2	17	5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	Kota Batam	30.79 %	<b>463,838,000</b>			30.79 %	<b>510,221,800</b>
2	17	5	2		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam	138 Orang	<b>241,109,500</b>			138 Orang	<b>265,220,450</b>
2	17	5	2	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam	180 Orang	241,109,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Koperasi dan Usaha Mikro	180 Orang	265,220,450
2	17	5	2		<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	Kota Batam	16.76 %	<b>222,728,500</b>			16.76 %	<b>245,001,350</b>
2	17	5	2	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	Kota Batam	180 Unit Usaha	222,728,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro yang dibina	180 Unit Usaha	245,001,350

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2	17	7			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif	Kota Batam	39.21 %	<b>806,460,500</b>			39.21 %	<b>887,106,550</b>
2	17	7	2		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Terlaksana nya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	Kota Batam	39.21 %	<b>806,460,500</b>			39.21 %	<b>887,106,550</b>
2	17	7	2	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam	160 Unit Usaha	252,538,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro	160 Unit Usaha	277,791,800
2	17	7	2	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	Kota Batam	250 Unit Usaha	268,286,500	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro	250 Unit Usaha	295,115,150
2	17	7	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Kota Batam	200 Orang	285,636,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro	200 Orang	314,199,600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
						Usaha Mikro							
2	17	8			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	Kota Batam	53.79 %	<b>1,768,483,000</b>			53.79 %	<b>1,945,331,300</b>
2	17	8	2		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	Kota Batam	470 Unit Usaha	<b>1,768,483,000</b>			470 Unit Usaha	<b>1,945,331,300</b>
2	17	8	2	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Batam	540 Unit Usaha	1,768,483,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Pelaku Usaha Mikro Kreatif	540 Unit Usaha	1,945,331,300
<b>TOTAL</b>									<b>14,364,380,737</b>			<b>15,897,018,811</b>	

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “*Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*”.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 yang mana program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2021–2026. Rumusan Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**A. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan:

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

**B. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kewenangan Kabupaten/Kota.

### **C. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro.

### **D. Program Pemberdayaan Usaha Mengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendatan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan:

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.

### **E. Program Pengembangan UMKM**

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub kegiatan:

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

**F. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatalaksanaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

b) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c) Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
- Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun rekapitulasi Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.4 :

**Tabel 3.4**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM**  
**TAHUN 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17						11,258,314,235						15,897,018,811		
2	17	1											100 %	12,184,898,311	
2	17	1	2.02				7,936,001,859						100 %	9,711,326,831	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rea lisa si Cap aian n RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 1 1 2.0 1 7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	7,900,561,859		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	41 Orang/bulan	9,656,062,831	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2 1 1 2.0 3 7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	35,440,000 ,		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Dokumen	55,264,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>2 1 1 2.0 6 7</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>292,425,000</b>						100 %	<b>321,667,500</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rea lisa si Cap aian n RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 1 1 2.0 1 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,650,000		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataa n Pembangu nan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Paket	23,019,700	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 1 2.0 2 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	59,564,500		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataa n Pembangu nan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Paket	69,571,700	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 1 2.0 4 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	16,564,000		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataa n Pembangu nan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Paket	16,625,400	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rea lisa si Cap aian n RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 1 1 2.0 5 7 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15,365,000		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangu nan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Paket	16,571,500	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 1 2.0 9 7 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lapo ran	132,464,000		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangu nan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Lapo ran	195,879,200	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 1 2.0 7 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	<b>113,575,000</b>						100 %	<b>666,712,800</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rea lisa si Cap aian n RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 1 1 2.0 6 7 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	113,575,000		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangu nan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	48 Unit	570,512,800	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 1 2.0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	<b>582,447,008</b>						100 %	<b>778,147,480</b>	
2 1 1 2.0 2 7 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapo ran	197,460,208		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangu nan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Lapo ran	354,706,000	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rea lisa si Cap aian n RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 1 1 2.0 4 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapo ran	348,946,,800		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataa n Pembangu nan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Lapo ran	423,441,480	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 1 2.0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%		%	100 %	<b>184,480,000</b>						100 %	<b>707,043,700</b>	
2 1 1 2.0 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38,280,000		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataa n Pembangu nan Ekonomi.	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	42,108,000	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah				
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	105,550,000		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Unit	154,440,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	40,650,000		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	56 Unit	44,715,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	423,437,000		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Unit	465,780,700	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
2	1	3		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Aktif	%		%	32.02 %	<b>90,943,000</b>						32.02 %	<b>215,953,100</b>	
2	1	3	2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	%		%	2.96 %	<b>196,321,000</b>						2.96 %	<b>215,953,100</b>	
2	1	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Kinerja			60 Unit Usaha	<b>90,943,000</b>		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi Aktif	120 Unit Usaha	215,953,100	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	1	4		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang Sehat	%		%	91.67 %	<b>139,552,500</b>						91.67 %	<b>153,507,750</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rea lisa si Cap aian n RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 1 4 2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yan dinilai Kesehatanya	%		%	41.67 %	5,920,000						41.67 %	153,507,750	
2 1 4 2.0 1	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				120 Unit Usaha	5,920,000		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataa n Pembangu nan Ekonomi.	Koperasi yang telah melaksana kan RAT	50 Unit Usaha	153,507,750	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	%		%	30.79 %	463,838,000						30.79 %	510,221,800	
2 1 5 2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang		Orang	138 Ora ng	241,109,500						138 Ora ng	265,220,450	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rea lisa si Cap aian n RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	dalam Daerah Kabupaten/Kota																
2 1 7	5 2.0 1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				180 Ora ng	241,109,500		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataa n Pembangu nan Ekonomi.	Koperasi dan Usaha Mikro	180 Ora ng	265,220,450	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 7	5 2.0 3		<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	%		%	16.76 %	<b>165,660,500</b>						16.76 %	<b>245,001,350</b>	
2 1 7	5 2.0 3	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro				180 Unit Usaha	165,660,500		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataa n Pembangu nan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro yang dibina	180 Unit Usaha	245,001,350	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 7	7		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA</b>	Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif	%		%	39.21 %	<b>806,460,500</b>						39.21 %	<b>887,106,550</b>	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2	1	7	2.0	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	%		%	39.21 %	1,380,075,00						39.21 %	887,106,550	
2	1	7	2.0	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				160 Unit Usaha	252,538,000		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro	160 Unit Usaha	277,791,800	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rea lisa si Cap aian n RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 1 7 7 2.0 1 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha				546 Unit Usaha	764,403,000		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangu nan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro	250 Unit Usaha	295,115,150	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 7 7 2.0 1 5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				600 Ora ng	616,205,792		Pendap atan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangu nan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro	200 Ora ng	314,199,600	DINAS KOPER ASI DAN USAHA MIKRO
2 1 7 8	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	%		%	53.79 %	<b>1,768,483,000</b>						53.79 %	<b>1,945,331,300</b>	
2 1 7 8 2.0 1	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	Unit Usaha		Unit Usaha	470 Unit Usaha	<b>1,768,483,000</b>						470 Unit Usaha	<b>1,945,331,300</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rea lisa si Cap aian n RKP D Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 1 8 2.0 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				250 Unit Usaha	1,000,238,000		Pendapatan asli daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro Kreatif	540 Unit Usaha	1,945,331,300	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>TOTAL</b>							<b>11,928,591,159</b>						<b>15,897,018,811</b>		

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rencana Kerja Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

### **4.1 Catatan Penting**

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan ini.

#### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 adalah:

- a. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026; dan
- b. Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023 menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan dan Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.